



# SINERGITAS PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH PENGEMBANGAN EKONOMI

## *ECONOMIC PLANNING SYNERGITY THROUGH ECONOMIC DEVELOPMENT AREA APPROACH*

**Bappelitbangda Kabupaten Bandung**  
**bappeda@bandungkab.go.id**

### **Abstrak**

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana kegiatan untuk masing-masing perangkat daerah yang sudah saling terintegrasi sesuai dengan isu atau kebijakan yang dihasilkan dari kajian sebelumnya terkait sektor perekonomian dengan tugas masing-masing dan pewartuannya. Laporan sinergitas ini memuat konsep sinergitas berdasarkan arah kebijakan, pewartuan dan konteks ruang. Sinergitas dokumen disusun berdasarkan pendekatan wilayah pengembangan ekonomi yang terbagi ke dalam 6 (enam) sub-wilayah pengembangan ekonomi (SWPE) masing-masing dengan karakteristik perekonomian, kondisi geografis dan aksesibilitas infrastruktur yang berbeda. Sinergitas Rencana kegiatan yang terintegrasi sesuai dengan isu atau kebijakan yang dihasilkan dari kajian sebelumnya, disusun berdasarkan kesesuaian antara substansi dokumen kajian dengan 4 capaian utama pada masterplan perekonomian. Rencana kegiatan juga disesuaikan dengan indikasi lokasi yang tertuang pada dokumen kajian dan dikelompokkan berdasarkan SWPE. Hasilnya adalah matriks sinergitas pada masing-masing SWPE yang memuat informasi mengenai arahan masterplan sebagai kerangka pengembangan, kemudian arahan tema pengembangan yang disesuaikan dengan Perbup tematik kawasan, arahan kebijakan yang disesuaikan dengan indikasi waktu implementasi dari tahun 2022 sampai tahun 2026, serta keterangan instansi yang terlibat.

**Kata kunci:** sinergitas perencanaan, SWIPE, pengembangan ekonomi

### **Abstract**

*The implementation of this activity is intended to develop activity plans for each regional apparatus that are mutually integrated in accordance with issues or policies resulting from previous studies related to the economic sector with their respective tasks and timing. This synergy report contains the concept of synergy based on policy direction, timing and spatial context. The synergy of the document is prepared based on the economic development area approach which is divided into 6 (six) economic development sub-regions (SWPE) each with different economic characteristics, geographical conditions and infrastructure accessibility. Synergy An activity plan that is integrated according to the issues or policies resulting from the previous study, is prepared based on the suitability between the substance of the study document and the 4 main achievements in the economic master plan. The activity plan is also adjusted to the location indication contained in the study document and grouped by SWPE. The result is a synergy matrix for each SWPE which contains information regarding the direction of the master plan as a development framework, then the direction for the development theme which is adjusted to the regional thematic Regional Regulations, the policy directive which is adjusted to indicate the implementation timeline from 2022 to 2026, as well as a description of the agencies involved.*

**Keywords:** *planning synergy, SWIPE, economic development*



## A. PENDAHULUAN

Bidang Perekonomian dan Investasi Bappelitbangda Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah menyusun beberapa Kajian yang diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan Perekonomian dan Investasi terutama dalam rangka mendukung pembangunan jangka menengah dan jangka pendek yang saat ini sedang dilaksanakan. Beberapa kajian tersebut masih bersifat sektoral dari beberapa isu yang saat ini sedang terjadi dan dari hasil kajian tersebut belum saling terintegrasi satu sama lainnya sehingga belum terlihat adanya sinergitas antar sektor dalam pelaksanaan pembangunan yang memerlukan adanya peran beberapa perangkat daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya satu dokumen yang dapat mensinergikan rencana-rencana yang sudah dihasilkan dari setiap kajian yang telah dibuat dalam satu dokumen perencanaan yang komperhensif dan saling melengkapi satu sama lainnya. Hal ini juga dapat mempermudah penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pada saat implementasi nantinya.



**Gambar 1 Ilustrasi Perlunya Menynergikan Kajian yang Dihasilkan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana kegiatan untuk masing-masing perangkat daerah yang sudah saling terintegrasi sesuai dengan isu atau kebijakan yang dihasilkan dari kajian sebelumnya terkait sektor perekonomian dengan tugas masing-masing dan pewartuannya. Adapun sasaran kegiatan ini terdiri dari:

- 1) Teridentifikasinya dokumen dan konsep sinergitas dokumen berdasarkan arah kebijakan, pewartuan, dan konteks ruang;
- 2) Tersusunnya sinergitas dokumen berdasarkan pendekatan wilayah pengembangan ekonomi; serta,
- 3) Terumuskannya rencana kegiatan untuk masing-masing perangkat daerah berdasarkan konsep sinergitas.

Manfaat yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah Perangkat Daerah memiliki dasar sebagai bahan rencana tindak dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pengembangan Perekonomian di Kabupaten Bandung. Sedangkan dampak yang

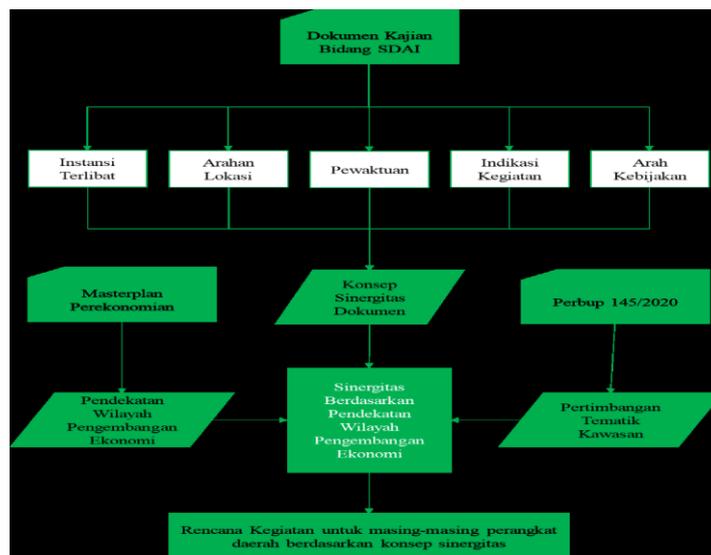


diharapkan adalah kebijakan yang disusun oleh pemerintah tepat sasaran dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### B. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini fokus pada menyinergikan dokumen kajian yang telah dihasilkan oleh Bidang SDAI Bappelitbangda Kabupaten Bandung. Dengan demikian, tahapan pertama dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi dan meninjau dokumen kajian yang telah dihasilkan khususnya yang bersifat sektoral, berdasarkan aspek instansi yang terlibat, arahan lokasi, pewaktuan, indikasi kegiatan, dan arah kebijakan. Berdasarkan hasil identifikasi dan tinjauan tersebut, kemudian disusun suatu konsep sinergitas dokumen dari dokumen-dokumen sektoral tersebut. Di sisi lain, terdapat dokumen lain yang sifatnya multisektor dengan wilayah rencana seluruh Kabupaten Bandung yaitu Perbup Nomor 145 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Tematik Kawasan dan Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung 2021-2026.

Sintesis dari konsep sinergitas dokumen dengan pendekatan wilayah pendekatan tematik kawasan pada Perbup 145/2020 dan pendekatan wilayah pengembangan ekonomi pada Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, menghasilkan suatu konsep sinergitas berdasarkan pendekatan konsep wilayah pengembangan ekonomi. Pertimbangan ini menjadi landasan dalam merumuskan rencana kegiatan untuk masing-masing perangkat daerah berdasarkan konsep sinergitas yang dihasilkan.



Gambar 2 Metodologi Penyusunan Sinergitas Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian

### C. TINJAUAN LITERATUR

#### Konsep Sinergitas Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian

Perumusan konsep sinergitas dokumen diuraikan dalam 2 (dua) aspek yaitu: Pertama, sinergitas dokumen kajian yang memuat kedudukan dan arah kebijakan dari masing-masing dokumen; Kedua, sinergitas pewaktuan yang memuat waktu pelaksanaan dan instansi yang terlibat dari masing-masing dokumen. Konsep sinergitas disusun berdasarkan tinjauan terhadap dokumen perencanaan yang terdiri dari: Dokumen Konsep Pengembangan UMKM Kabupaten Bandung (2021), Dokumen Road Map E-Commerce Kabupaten Bandung



(2021), Dokumen Identifikasi dan Inventaris Potensi Geowisata di Kawasan Panas Bumi Kabupaten Bandung (2021), Dokumen Perencanaan Pengembangan Potensi Wisata Geothermal Kabupaten Bandung (2021), Dokumen Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (2021), serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 145 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Tematik Kawasan.

Hasil tinjauan terhadap dokumen kajian tersebut, yang ditinjau berdasarkan aspek arah kebijakan, indikasi kegiatan, pewaktuan, arahan lokasi, dan instansi terlibat, memberikan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. Sintesis Identifikasi dan Tinjauan Dokumen Kajian**

No.	Judul Dokumen	Kedalaman					Ket.
		Arah Kebijakan	Indikasi Kegiatan	Pewaktuan	Arahan Lokasi	Instansi Terlibat	
1	Konsep Pengembangan UMKM	✓	✓	✓		✓	
2	Roadmap E-commerce	✓	✓	✓		✓	
3	Identifikasi dan Inventaris Potensi Geowisata di Kawasan Panas Bumi				✓		Bandung Selatan
4	Perencanaan Pengembangan Potensi Wisata Geothermal	✓	✓	✓	✓	✓	Bandung Selatan
5	Masterplan Perekonomian	✓		✓	✓	✓	
6	Perbup 145/2020 tentang Percepatan Pembangunan Tematik Kawasan	✓					Rancangan kelembagaan

### Konsep Pendekatan Wilayah Pengembangan Ekonomi

Dalam merumuskan wilayah pengembangan ekonomi, tahapan pertama yang dilakukan adalah meninjau pertimbangan arahan pengembangan ruang dari dokumen kajian yang telah dihasilkan. Selanjutnya adalah merumuskan pembagian wilayah pengembangan berdasarkan potensi dan karakteristik ekonomi dari masing-masing wilayah.

#### a. Tinjauan Ruang Dokumen Kajian

Masterplan perekonomian memberi penekanan pada konteks ruang dan pergerakan. Konsep dirumuskan berdasarkan hasil analisis mengenai potensi sektor ekonomi unggulan. Terdapat 3 unsur dalam konsep ini yaitu ekosistem, simpul dan pergerakan.





koperasi. Sedangkan Kajian Roadmap E-Commerce di SWPE I termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor perdagangan dengan sub-capaian tahap IV yaitu pengembangan e-commerce. Dalam arahan tematik kawasan, kedua capaian tersebut diarahkan pada tema industri kecil, edukasi dan teknologi, serta kuliner.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Kajian Konsep Pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung, arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE I yaitu: pada tahun 2022-2023 fokus pada pendataan, peningkatan akses pendataan, peningkatan akses pendanaan, pemberdayaan kelembagaan kemitraan, dan digitalisasi; kemudian pada tahun 2024-2026 fokus pada peningkatan literasi keuangan, sertifikasi, pemberian subsidi / insentif, peningkatan R&D, pelatihan, pemasaran, inovasi, serta sistem promosi. Sedangkan berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Roadmap E-commerce arahan pengembangan fokus pada pendataan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, infrastruktur komunikasi, logistik, serta keamanan siber yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai tahun 2026. Berikut adalah matriks sinergitas pada SWPE I.

#### **b. Sinergitas Pada Sub-Wilayah Pengembangan Ekonomi II**

SWPE II terdiri dari 4 Kecamatan, dengan karakteristik umum ekonomi perkotaan yang didorong perkembangannya, meliputi Kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung. Dokumen perencanaan perekonomian yang berkaitan dengan SWPE II yaitu Kajian Penguatan UMKM dan Koperasi, serta Kajian Pengembangan Roadmap E-Commerce.

Dalam kerangka Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung, Pengembangan UMKM di SWPE II termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor industri pengolahan dengan sub-capaian tahap II yaitu penguatan UMKM dan koperasi. Sedangkan Kajian Roadmap E-Commerce di SWPE II termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor perdagangan dengan sub-capaian tahap IV yaitu pengembangan e-commerce. Dalam arahan tematik kawasan, kedua capaian tersebut diarahkan pada tema industri kecil, edukasi dan teknologi, serta kuliner.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Kajian Konsep Pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung, arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE II yaitu: pada tahun 2022-2023 fokus pada pendataan, peningkatan akses pendataan, peningkatan akses pendanaan, pemberdayaan kelembagaan kemitraan, dan digitalisasi; kemudian pada tahun 2024-2026 fokus pada peningkatan literasi keuangan, sertifikasi, pemberian subsidi / insentif, peningkatan R&D, pelatihan, pemasaran, inovasi, serta sistem promosi. Sedangkan berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Roadmap E-commerce arahan pengembangan fokus pada pendataan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, infrastruktur komunikasi, logistik, serta keamanan siber yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai tahun 2026.

Matriks sinergitas pada SWPE II ini memiliki kesamaan dengan matriks sinergitas pada SWPE I. Hal ini disebabkan dari dokumen yang ditinjau hanya kajian pariwisata yang memberikan konteks ruang, itupun terbatas pada wilayah Kabupaten Bandung bagian Selatan. Dengan demikian, selain wilayah yang merupakan pengembangan wisata panas bumi, maka matriks sinergitasnya akan memiliki kesamaan.

#### **c. Sinergitas Pada Sub-Wilayah Pengembangan Ekonomi III**

SWPE III terdiri dari 3 Kecamatan, dengan karakteristik umum ekonomi pedesaan yaitu Kecamatan Ciwidey, Rancabali, dan Pasirjambu. Dokumen perencanaan perekonomian yang berkaitan dengan SWPE III yaitu Konsep Pengembangan UMKM, Roadmap E-Commerce, dan perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung.

Dalam kerangka Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung, Kajian Konsep Pengembangan UMKM di SWPE III termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor industri pengolahan dengan sub-capaian tahap II yaitu penguatan UMKM dan koperasi. Kajian Roadmap E-Commerce di SWPE III termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor perdagangan dengan sub-capaian tahap IV yaitu pengembangan e-commerce. Sedangkan kajian perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung di SWPE III termasuk ke dalam capaian utama peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung dengan sub-capaian tahap I yaitu peningkatan aksesibilitas wisata, tahap II yaitu penguatan investasi pariwisata, tahap III yaitu pengembangan kawasan wisata unggulan Bandung Selatan, serta tahap IV yaitu pengembangan kerjasama wisata Cekungan Bandung.

Dalam arahan tematik kawasan, sub-capaian penguatan UMKM dan koperasi serta sub-capaian pengembangan e-commerce diarahkan pada tema pengembangan industri kecil, edukasi dan teknologi, serta kuliner. Untuk sub-capaian peningkatan aksesibilitas wisata, sub-capaian penguatan investasi pariwisata, serta sub-capaian pengembangan kerjasama wisata Cekungan Bandung diarahkan pada tema pengembangan kuliner, wisata alam, dan seni budaya. Sedangkan sub-capaian pengembangan kawasan wisata unggulan Bandung Selatan diarahkan pada tema pengembangan agro-forestry, industri kecil, kuliner, wisata alam, dan seni budaya.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Kajian Konsep Pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung, arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE III yaitu: pada tahun 2022-2023 fokus pada pendataan, peningkatan akses pendataan, peningkatan akses pendanaan, pemberdayaan kelembagaan kemitraan, dan digitalisasi; kemudian pada tahun 2024-2026 fokus pada peningkatan literasi 47 keuangan, sertifikasi, pemberian subsidi / insentif, peningkatan R&D, pelatihan, pemasaran, inovasi, serta sistem promosi.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Roadmap E-commerce arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE III yaitu fokus pada pendataan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, infrastruktur komunikasi, logistik, serta keamanan siber yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai tahun 2026.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen kajian perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung, arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE III memuat 7 (tujuh) arahan kebijakan diantaranya: (1) Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing; (2) Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis; (3) Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi; (4) Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing; (5) Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan; (6) Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas;



serta (7) Pelaksanaan produk hukum dan peraturan daerah dalam pengembangan kawasan panas bumi.

Dokumen kajian perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung ini tidak secara spesifik mencantumkan waktu implementasi. Dengan demikian penentuan waktu implementasi terhadap kerangka sinergitas disesuaikan dengan kerangka masterplan perekonomian Kabupaten Bandung yang membagi tahapan menjadi 3 yaitu tahap pra-adopsi tahun 2022, tahap adopsi tahun 2023-2025, serta pasca adopsi tahun 2026. Hasilnya pada tahun 2022 arahan pengembangan fokus pada arahan kebijakan 1, 3, 4, dan 7 yang memiliki karakteristik peningkatan kapasitas dan optimalisasi potensi pariwisata. Pada tahun 2023-2025 arahan pengembangan fokus pada arahan kebijakan 2, 5, dan 6 yang memiliki karakteristik pengembangan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sedangkan pada tahun 2026 fokus pada evaluasi pada arahan kebijakan yang telah diimplementasikan sebelumnya. Berikut adalah matriks sinergitas dokumen kajian pada SWPE III.

#### **d. Sinergitas Pada Sub-Wilayah Pengembangan Ekonomi IV**

SWPE IV terdiri dari 3 Kecamatan, dengan karakteristik umum ekonomi pedesaan yaitu Kecamatan Cimaung, Pangalengan, dan Kertasari. Dokumen perencanaan perekonomian yang berkaitan dengan SWPE IV yaitu Konsep Pengembangan UMKM, Roadmap E-Commerce, dan perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung. Kondisi SWPE IV ini memiliki kesamaan dengan kondisi SWPE III.

Dalam kerangka Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung, Kajian Konsep Pengembangan UMKM di SWPE IV termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor industri pengolahan dengan sub-capaian tahap II yaitu penguatan UMKM dan koperasi. Kajian Roadmap E-Commerce di SWPE IV termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor perdagangan dengan sub-capaian tahap IV yaitu pengembangan e-commerce. Sedangkan kajian perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung di SWPE IV termasuk ke dalam capaian utama peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung dengan sub-capaian tahap I yaitu peningkatan aksesibilitas wisata, tahap II yaitu penguatan investasi pariwisata, tahap III yaitu pengembangan kawasan wisata unggulan Bandung Selatan, serta tahap IV yaitu pengembangan kerjasama wisata Cekungan Bandung.

Dalam arahan tematik kawasan, sub-capaian penguatan UMKM dan koperasi serta sub-capaian pengembangan e-commerce diarahkan pada tema pengembangan industri kecil, edukasi dan teknologi, serta kuliner. Untuk sub-capaian peningkatan aksesibilitas wisata, sub-capaian penguatan investasi pariwisata, serta sub-capaian pengembangan kerjasama wisata Cekungan Bandung diarahkan pada tema pengembangan kuliner, wisata alam, dan seni budaya. Sedangkan sub-capaian pengembangan kawasan wisata unggulan Bandung Selatan diarahkan pada tema pengembangan agro-forestry, industri kecil, kuliner, wisata alam, dan seni budaya.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Kajian Konsep Pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung, arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE IV yaitu: pada tahun 2022-2023 fokus pada pendataan, peningkatan akses pendataan, peningkatan akses pendanaan, pemberdayaan kelembagaan kemitraan,



dan digitalisasi; kemudian pada tahun 2024-2026 fokus pada peningkatan literasi keuangan, sertifikasi, pemberian subsidi / insentif, peningkatan R&D, pelatihan, pemasaran, inovasi, serta sistem promosi.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Roadmap E-commerce arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE IV yaitu fokus pada pendataan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, infrastruktur komunikasi, logistik, serta keamanan siber yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai tahun 2026.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen kajian perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung, arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE IV memuat 7 (tujuh) arahan kebijakan diantaranya: (1) Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing; (2) Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis; (3) Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi; (4) Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing; (5) Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan; (6) Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas; serta (7) Pelaksanaan produk hukum dan peraturan daerah dalam pengembangan kawasan panas bumi.

Dokumen kajian perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung ini tidak secara spesifik mencantumkan waktu implementasi. Dengan demikian penentuan waktu implementasi terhadap kerangka sinergitas disesuaikan dengan kerangka masterplan perekonomian Kabupaten Bandung yang membagi tahapan menjadi 3 yaitu tahap pra-adopsi tahun 2022, tahap adopsi tahun 2023-2025, serta pasca adopsi tahun 2026. Hasilnya pada tahun 2022 arahan pengembangan fokus pada arahan kebijakan 1, 3, 4, dan 7 yang memiliki karakteristik peningkatan kapasitas dan optimalisasi potensi pariwisata. Pada tahun 2023-2025 arahan pengembangan fokus pada arahan kebijakan 2, 5, dan 6 yang memiliki karakteristik pengembangan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sedangkan pada tahun 2026 fokus pada evaluasi pada arahan kebijakan yang telah diimplementasikan sebelumnya. Berikut adalah matriks sinergitas pada SWPE IV.

#### **e. Sinergitas Pada Sub-Wilayah Pengembangan Ekonomi V**

SWPE V terdiri dari 5 Kecamatan, dengan karakteristik umum ekonomi pedesaan (semi perkotaan) yang meliputi Kecamatan Solokanjeruk, Majalaya, Paseh, Pacet dan Ibum. Dokumen perencanaan perekonomian yang berkaitan dengan SWPE V yaitu Konsep Pengembangan UMKM, Roadmap E-Commerce, dan perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung. Kondisi SWPE V ini memiliki kesamaan dengan kondisi SWPE III dan SWPE IV.

Dalam kerangka Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung, Kajian Konsep Pengembangan UMKM di SWPE V termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor industri pengolahan dengan sub-capaian tahap II yaitu penguatan UMKM dan koperasi. Kajian Roadmap E-Commerce di SWPE V termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor perdagangan dengan sub-capaian tahap IV yaitu pengembangan e-commerce. Sedangkan kajian perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung di SWPE V termasuk ke dalam capaian



utama peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung dengan sub-capaian tahap I yaitu peningkatan aksesibilitas wisata, tahap II yaitu penguatan investasi pariwisata, tahap III yaitu pengembangan kawasan wisata unggulan Bandung Selatan, serta tahap IV yaitu pengembangan kerjasama wisata Cekungan Bandung.

Dalam arahan tematik kawasan, sub-capaian penguatan UMKM dan koperasi serta sub-capaian pengembangan e-commerce diarahkan pada tema pengembangan industri kecil, edukasi dan teknologi, serta kuliner. Untuk sub-capaian peningkatan aksesibilitas wisata, sub-capaian penguatan investasi pariwisata, serta sub-capaian pengembangan kerjasama wisata Cekungan Bandung diarahkan pada tema pengembangan kuliner, wisata alam, dan seni budaya. Sedangkan sub-capaian pengembangan kawasan wisata unggulan Bandung Selatan diarahkan pada tema pengembangan agro-forestry, industri kecil, kuliner, wisata alam, dan seni budaya.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Kajian Konsep Pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung, arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE V yaitu: pada tahun 2022-2023 fokus pada pendataan, peningkatan akses pendataan, peningkatan akses pendanaan, pemberdayaan kelembagaan kemitraan,

dan digitalisasi; kemudian pada tahun 2024-2026 fokus pada peningkatan literasi keuangan, sertifikasi, pemberian subsidi / insentif, peningkatan R&D, pelatihan, pemasaran, inovasi, serta sistem promosi.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Roadmap E-commerce arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE V yaitu fokus pada pendataan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, infrastruktur komunikasi, logistik, serta keamanan siber yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai tahun 2026.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen kajian perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung, arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE V memuat 7 (tujuh) arahan kebijakan diantaranya: (1) Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing; (2) Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis; (3) Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi; (4) Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing; (5) Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan; (6) Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas; serta (7) Pelaksanaan produk hukum dan peraturan daerah dalam pengembangan kawasan panas bumi.

Dokumen kajian perencanaan pengembangan potensi Geothermal di Kabupaten Bandung ini tidak secara spesifik mencantumkan waktu implementasi. Dengan demikian penentuan waktu implementasi terhadap kerangka sinergitas disesuaikan dengan kerangka masterplan perekonomian Kabupaten Bandung yang membagi tahapan menjadi 3 yaitu tahap pra-adopsi tahun 2022, tahap adopsi tahun 2023-2025, serta pasca adopsi tahun 2026. Hasilnya pada tahun 2022 arahan pengembangan fokus pada arahan kebijakan 1, 3, 4, dan 7 yang memiliki karakteristik peningkatan kapasitas dan optimalisasi potensi pariwisata. Pada tahun 2023-2025 arahan pengembangan fokus pada arahan kebijakan 2, 5, dan 6 yang memiliki karakteristik pengembangan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sedangkan pada tahun 2026 fokus pada



evaluasi pada arahan kebijakan yang telah diimplementasikan sebelumnya. Berikut adalah matriks sinergitas pada SWPE V.

#### **f. Sinergitas Pada Sub-Wilayah Pengembangan Ekonomi VI**

SWPE VI terdiri dari 3 Kecamatan, dengan karakteristik umum ekonomi pedesaan, yang meliputi Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, dan Cileunyi. Dokumen yang perencanaan perekonomian yang berkaitan dengan SWPE VI yaitu Kajian Penguatan UMKM dan Koperasi, serta Kajian Pengembangan Roadmap E-Commerce.

Dalam kerangka Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung, Pengembangan UMKM di SWPE VI termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor industri pengolahan dengan sub-capaian tahap II yaitu penguatan UMKM dan koperasi. Sedangkan Kajian Roadmap E-Commerce di SWPE VI termasuk ke dalam capaian utama peningkatan PDRB sektor perdagangan dengan sub-capaian tahap IV yaitu pengembangan e-commerce. Dalam arahan tematik kawasan, kedua capaian tersebut diarahkan pada tema industri kecil, edukasi dan teknologi, serta kuliner.

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Kajian Konsep Pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung, arahan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi SWPE VI yaitu: pada tahun 2022-2023 fokus pada pendataan, peningkatan akses pendataan, peningkatan akses pendanaan, pemberdayaan kelembagaan kemitraan, dan digitalisasi; kemudian pada tahun 2024-2026 fokus pada peningkatan literasi keuangan, sertifikasi, pemberian subsidi / insentif, peningkatan R&D, pelatihan, pemasaran, inovasi, serta sistem promosi. Sedangkan berdasarkan tinjauan terhadap dokumen Roadmap E-commerce arahan pengembangan yang berkaitan dengan SWPE VI fokus pada pendataan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, infrastruktur komunikasi, logistik, serta keamanan siber yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai tahun 2026.

Matriks sinergitas pada SWPE VI ini memiliki kesamaan dengan matriks sinergitas pada SWPE II dan SWPE I. Hal ini disebabkan dari dokumen yang ditinjau hanya kajian pariwisata yang memberikan konteks ruang, itupun terbatas pada wilayah Kabupaten Bandung bagian Selatan. Dengan demikian, selain wilayah yang merupakan pengembangan wisata panas bumi, maka matriks sinergitasnya akan memiliki kesamaan.

### **E. PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Sinergitas perencanaan untuk dokumen kajian yang telah dihasilkan, diwujudkan melalui matriks arahan kebijakan yang disusun dengan pendekatan wilayah pengembangan ekonomi. Sinergitas memerhatikan dua aspek utama yaitu arahan kebijakan yang diuraikan berdasarkan waktu pelaksanaan, serta arahan kebijakan yang diuraikan berdasarkan lokasi kegiatan. Dari 6 (enam) dokumen kajian yang menjadi tinjauan, terdapat 4 (empat) dokumen yang memuat arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan, 3 (tiga) diantaranya menjelaskan secara spesifik pewaktuan dari setiap arahan kebijakan, 2 (dua) diantaranya mencantumkan lokasi spesifik dari setiap kegiatan, serta hanya 1 (satu) dokumen yang memuat lokasi dan waktu implementasi



rencana yang diuraikan secara spesifik yaitu dokumen Masterplan Perekonomian Kabupaten, yang digunakan sebagai kerangka utama sinergitas.

Konsep sinergitas arahan kebijakan memertimbangkan substansi berdasarkan ruang lingkup kajian. Dari 6 dokumen, 1 dokumen bersifat mikro yaitu inventaris dan pendataan potensi wisata, 3 dokumen bersifat meso yang memuat kajian yang bersifat sektoral baik dari segi materi maupun wilayah yaitu pengembangan UMKM, roadmap e-commerce, pengembangan wisata panas bumi Bandung Selatan, serta 2 dokumen yang bersifat makro yang memuat kajian multi sektor pada lingkup Kabupaten yaitu Perbup Pengembangan Kawasan Tematik dan Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung. Dengan demikian, sinergitas menggunakan kerangka substansi yang bersifat makro agar bisa melingkupi seluruh aspek dalam perencanaan perekonomian di Kabupaten Bandung, dalam hal ini menggunakan kerangka perencanaan dalam Masterplan Perekonomian.

Konsep sinergitas pewaktuan menunjukkan bahwa dari 3 dokumen kajian yang memuat pewaktuan, 1 dokumen memiliki rencana waktu implementasi tahun 2021-2025, 2 dokumen lain memiliki rencana waktu implementasi tahun 2021-2026. Dengan demikian, sinergitas menggunakan rencana waktu implementasi yang paling lama yaitu 2021-2026. Untuk 3 dokumen kajian lainnya yang tidak memuat pewaktuan, maka penentuan waktu implementasi dilakukan dengan memertimbangkan substansi arahan kebijakan yang disesuaikan dengan kerangka pewaktuan Masterplan Perekonomian.

Konsep sinergitas ruang menunjukkan bahwa dari 2 dokumen kajian yang memuat analisis terhadap ruang, 1 dokumen menunjukkan tinjauan ruang tetapi tidak lebih lanjut menjelaskan kaitannya dengan arahan kebijakan yang dihasilkan, 1 dokumen, yaitu Masterplan Perekonomian, merumuskan arahan kebijakan yang berkorepondensi terhadap ruang. Masterplan Perekonomian juga menjelaskan bagian wilayah Kabupaten Bandung berdasarkan potensi perekonomian masing-masing kecamatan, yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan pembagian wilayah pengembangan ekonomi sebagai kerangka perumusan sinergitas.

Dalam mewujudkan sinergitas dokumen perencanaan perekonomian berdasarkan pendekatan wilayah pengembangan ekonomi, maka terlebih dahulu disusun pembagian sub-wilayah pengembangan ekonomi (SWPE) dengan pertimbangan kesamaan karakteristik perekonomian, kondisi geografis dan aksesibilitas infrastruktur. Hasilnya terdapat 6 (enam) SWPE yaitu: SWPE I (Kawasan Perkotaan I: Kecamatan Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Ciparay, Baleendah, Pameungpeuk, Katapang, Kutawaringin, Soreang, Canguang, Banjaran dan Arjasari), SWPE II (Kawasan Perkotaan II yang didorong perkembangannya: Kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Nagreg, dan Cikancung), SWPE III (Kecamatan Pangalengan, Cimaung, dan Kertasari), SWPE IV (Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali), SWPE V (Kecamatan Majalaya, Solokanjeruk, Paseh, Pacet, dan Ibum), serta SWPE VI (Cileunyi, Cilengkrang, dan Cimenyan).

Rencana kegiatan yang terintegrasi sesuai dengan isu atau kebijakan yang dihasilkan dari kajian sebelumnya, disusun berdasarkan kesesuaian antara substansi dokumen kajian dengan 4 capaian utama pada masterplan. Rencana kegiatan juga disesuaikan dengan indikasi lokasi yang tertuang pada dokumen kajian dan



dikelompokkan berdasarkan SWPE. Hasilnya adalah matriks sinergitas pada masing-masing SWPE yang memuat informasi mengenai arahan masterplan sebagai kerangka pengembangan, kemudian arahan tema pengembangan yang disesuaikan dengan Perbup tematik kawasan, arahan kebijakan yang disesuaikan dengan indikasi waktu implementasi dari tahun 2022 sampai tahun 2026, serta keterangan instansi yang terlibat. Secara lengkap hasil sinergitas ini terdapat pada Tabel 4.1 sampai Tabel 4.6 yang dijelaskan pada Bab 4.

Konsep sinergitas pada kajian ini fokus pada dokumen kajian dan perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bidang SDAI Bappelitbangda Kabupaten Bandung. Pada saat kegiatan ini dilaksanakan, terdapat 6 kajian yang menjadi tinjauan. Meski demikian, kerangka yang konseptual pada kajian dapat digunakan untuk mengakomodasi dokumen kajian lainnya yang dihasilkan di masa depan, baik oleh Bappelitbangda Kabupaten Bandung maupun kajian lain yang relevan. Direkomendasikan untuk memasukkan sebanyak mungkin kajian yang relevan agar matriks sinergitas yang dihasilkan bisa semakin kaya, sehingga arah pengembangan perekonomian di Kabupaten Bandung semakin terarah.

Dalam melakukan kajian pengembangan perekonomian, perlu diperhatikan ruang lingkup kajian, pelaksana, serta substansi yang dimaksud. Kajian dapat dibagi menjadi kajian mikro yang membahas topik spesifik di satu sektor atau sebagian wilayah Kabupaten, kajian meso yang membahas satu sektor di lingkup kabupaten, kajian makro yang membahas lingkup kabupaten secara komprehensif dan multi sektor, serta kajian kemitraan yang membahas kerjasama regional, nasional dan internasional. Bappelitbangda dapat berperan dalam menghasilkan kajian-kajian yang bersifat makro dan meso. Untuk kajian yang bersifat mikro dan kemitraan, Bappelitbangda dapat menginisiasi atau menjalin kerjasama dengan instansi lain di lingkungan Kabupaten Bandung atau yang lebih luas. Khususnya untuk pengembangan ekonomi, kerangka yang dikembangkan disarankan mengacu pada Masterplan Perekonomian.

## **b. Saran**

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat direkomendasikan beberapa judul kajian yang dapat dilakukan oleh Bappelitbangda khususnya Bidang SDAI untuk menyempurnakan hasil kajian ini secara khusus, serta memperkaya kajian bidang perekonomian pada umumnya. Beberapa judul kajian yang direkomendasikan antara lain:

1. Penyusunan rencana perlindungan lahan pertanian produktif;
2. Penyusunan rencana aksi pengembangan logistik pangan dan simpul pangan;
3. Penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan pertanian terpadu di Bandung Selatan;
4. Penyusunan rencana aksi pengembangan pusat penelitian dan teknologi pertanian;
5. Penyusunan rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu;
6. Penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan industri terintegrasi di Bandung Tengah;
7. Penyusunan rencana pengembangan industri hulu dan peningkatan kualitas industri hulu berbasis pertanian;
8. Penyusunan rencana peningkatan tata kelola pasar;



9. Penyusunan rencana aksi pembangunan simpul perdagangan dan distribusi pangan;
10. Penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan perdagangan terpadu di Bandung Tengah.

## REFERENSI